Analisa Dampak *Political Trust* dan *Political Efficacy* terhadap Partisipasi Politik Calon Pemilih Pemula

Seta Basri*

ABSTRACT

Pemilih pemula merupakan pemilih potensial, dan sebagai warganegara muda posisi mereka sangat strategis di dalam keberlangsungan sistem politik Indonesia. Penelitian ini menyelidi penerapan konsep *political trust* dan *political efficacy* yang berlangsung di dalam dimensi subyektif individu warganegara. Kedua konsep tersebut merupakan dimenasi evaluasi yang nantinya menentukan keputusan model partisipasi politik apa yang mereka pilih. Populasi penelitian adalah siswa sekolah lanjutan atas tingkat akhir yang duduk di tingkat XII dan tidak lama lagi akan ikut sebagai konstituen pemilu. Sampel yang diambil sejumlah 165 orang dan dipilih hanya mereka yang dalam waktu dekat akan mendapatkan hak pilih. Hipotesis penelitian akan diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara serentak political trust dan political efficacy berdampak pada partisipasi politik pemilih pemula. Namun secara individual political trust tidak memiliki dampak signinfikan akibat agak rendahnya political trust para pemilih pemula atas aktor dan lembaga politik di Indonesia, yang juga sama halnya dengan external political efficacy. Hal yang cukup postitif adalah internal political efficacy para pemililh pemula cukup tinggi sehingga membawa harapan akan partisipasi politik mereka yang lebih aktif di masa mendatang.

Kata Kunci : *Political Trust*, *Political Efficacy*, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

PENDAHULUAN

Para pemilih pemula adalah warganegara yang potensial menjadi penggerak sistem politik Indonesia. Para calon pemilih pemula yang umumnya masih duduk di tingkat akhir sekolah lanjutan tingkat atas, menyerap kesan-kesan politik negara, lalu menjadikannya bahan evaluasi untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Bagaimana nasib sistem politik Indonesia di masa mendatang, salah satunya akan dipengaruhi oleh partisipasi politik mereka ini.

Para calon pemilih ini di dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi pemilih pemula dalam kegiatan pemilu. Secara minimal, mereka akan terlibat dalam kegiatan voting. Namun, secara lebih luas ada kemungkinan di antara mereka yang sudah mengambil bagian dalam tim-tim kampanye kendati bukan untuk posisi strategis. Para siswa yang merupakan pemilih pemula di dalam penelitian ini, akan disebut selanjutnya sebagai calon pemilih pemula. Kendati mungkin di antara mereka ada yang sudah aktif di dalam kelompok-kelompok politik, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Kemungkinkan terbesar dari mereka seluruhnya adalah sekadar para calon pemilih pemula, dan penyebutan ini akan digunakan di paragraf-paragraf selanjutnya.

Dalam konteks calon pemilih pemula, hal yang menarik untuk diteliti adalah konsep *Political Trust* dan *Political Efficacy.* Kedua konsep politik di level individu ini diyakini memiliki dampak atas minat partisipasi politik yang ada di dalam diri mereka. Selaku warganegara biasa, mereka termasuk orang-orang yang bukan bekerja sebagai pejabat publik semisal pegawai negeri sipil ataupun militer. Dua kategori yang terakhir, kegiatan

sehari-harinya berkenaan dengan keterlibatan di dalam masalah politik. Para calon pemilih pemula adalah pelajar yang sebentar lagi menjadi warga negara muda-dewasa yang tindakan-tindakan serta penilaian-penilaian politiknya akan berdampak besar bagi negara ini.

Partisipasi politik merupakan "bahan bakar" yang menyiram dan memberi tenaga agar dinamika kehidupan bermasyarakat dan berpolitik tetap ada. Tanpa partisipasi politik, pemerintah akan kehilangan legitimasinya, terasing, dan dianggap tidak memiliki otoritas di mata warga negara. Dapat kita bayangkan, jika dalam suatu Pemilu tidak satupun warganegara datang ke TPS-TPS. Apa yang terjadi kemudian?

Partisipasi politik adalah suatu variabel bergantung. Terdapat serangkaian variabel penyebab yang memicu munculnya partisipasi politik sebagai suatu tindakan. *Political trust* dan *political efficacy* menempati posisi yang *urgent* dalam konteks ini. Kendati ada di level subyektif individu, kedua variabel ini mendorong muncul atau termanifestasinya tindak-tindak politik secara nyata warganegara (partisipasi politik).

Latar Belakang

Kajian partisipasi politik sangat berlimpah di kepustakaan ilmu politik. Salah satu kajian perintis dan terpopuler adalah seperti yang dilakukan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengenai partisipasi politik di negara berkembang. Kajian Huntinton dan Nelson ini kemudian banyak dilansir oleh peneliti-peneliti di seputar partisipasi politik di masa kemudian.

Dalam kajiannya mengenai negara-negara demokrasi yang baru tumbuh, Mariano Torcal dan Ignacio Lago menemukan fakta bahwa *Political Dissaffection* mampu menjelaskan rendahnya tingkat partisipasi politik, baik yang bersifat konvensional (pemilu) maupun nonkonvensional, seperti lobi, aktif dalam organisasi politik, kampanye, dan sejenisnya. (Torcal and Lago, 2006: 316). *Political Disaffection* berlingkup pada *Institutional Disaffection* dan *Political Disengagement*. *Political Disaffection* mendorong partisipasi politik yang rendah di kalangan warganegara biasa. Jadi, semakin tinggi kadar *Political Disaffection*, maka semakin rendah tingkat partisipasi politik warganegara.

Kajian lain mengenai *Political Trust* dan *Political Efficacy* ditunjukkan oleh Anthony J. Eksterowicz dan Robert North Roberts dalam kajian mereka mengenai jurnalisme publik dan pengetahuan politik. Mereka menemukan fakta bahwa turunnya *Political Trust* berhubungan dengan turunnya *Political Efficacy*. Lebih jauh, turunnya *Political Trust* dan *Political Efficacy* mendorong turunnya keinginan warganegara untuk melakukan partisipasi politik (Eksterowicz and Roberts, 2000: 152).

Penelitian lain berusaha menghubungkan *Political Efficacy*, *Political Disaffection* dan *Political Trust*. Jika *Political Trust* tinggi dan *Political Efficacy* tinggi, maka warganegara cenderung akan melakukan partisipasi politik yang mendukung pemerintahan. Jika *Political Trust* tinggi, *Political Efficacy* rendah, maka warganegara menjadi pasif kendati mendukung pemerintahan. Jika *Political Trust* rendah, *Political Efficacy* tinggi, maka warganegara berpartisipasi politik untuk mengkritik pemerintah. Akhirnya, jika *Political Trus*t rendah, *Political Efficacy* rendah, maka warganegara akan mengalami *Political Disaffection* (Johnston, 2009: 191).

Studi yang dilakukan oleh Roderick P. Hart menunjukkan serangkaian variabel kompleks yang berdampak pada Partisipasi Politik. Partisipasi politik secara signifikan berkorelasi dengan usia, pendapatan, dan *political efficacy*. Selain itu, *political efficacy* meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, pendidikan, dan *Political Trust*. Bennett menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah satu variabel tersendiri (Hart, 2006: 422-3).

Secara konseptual, *Political Efficacy* seharusnya berkorelasi dengan partisipasi politik, demikian dilontarkan Eran Vigota-Gadot dan Aaron Cohen (Cohen and Gadot, 2004: 85). Seseorang dengan *internal* dan *external political effiicacy* yang tinggi akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam partisipasi politik.

Political Trust memiliki korelasi dengan aneka bentuk partisipasi politik, dengan mana fakta seperti ini dapat ditemukan melalui hasil penelitian yang dilakukan Kenneth R. Hoover dan Todd Dovovan (Hoover and Donovan, 2008: 191). Kepercayaan atas pemerintah di 29 negara yang mereka teliti, menunjukkan keterkaitan yang tinggi bahwa gagasan kewarganegaraan perlu dibuktikan lewat tindak pemberian suara di pemilu.

Political Disaffection, menurut Richard Gunther, et.al., merupakan satu variabel yang bertanggung jawab atas rendahnya keterlibatan warganegara dalam partisipasi politik (Gunther, Montero, and Torcal, 2007: 66). Demikian fakta yang mereka temukan atas studi mereka di Spanyol, Uruguay, Hungaria, Bulgaria, dan Portugal. Mereka juga menyimpulkan bahwa *Political Disaffection* dan keanggotaan di dalam organisasi menjadi determinan statistik utama dalam konteks kajian partisipasi politik.

Perumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Political Trust* dan *Political Efficacy* memiliki pengaruh terhadap Partisipasi Politik calon pemilih pemula?
2. Bagaimanakah sifat hubungan antara *Political Trust* dan *Political Disaffection* dengan Partisipasi Politik calon pemilih pemula?

Signifikansi Penulisan

Signifikansi penulisan ini adalah :

1. Sebagai upaya penjelajahan atas konsep *Political Trust* dan *Political Efficacy*, dalam konteks partisipasi politik calon pemilih pemula.
2. Sebagai upaya pemetaan sederhana seputar dimensi subyektif partisipasi politik di kalangan individu warganegara Indonesia.
3. Sebagai upaya mencari alternatif pemeliharan sistem politik yang ditujukan kepada warganegara muda, khususnya merumuskan konsep pembangunan politik demi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan :

1. Mengisi khasanah ilmu politik dan ilmu administrasi di perpustakaan.
2. Mengasah kemampuan nalar ilmiah bagi kalangan dosen dan mahasiswa, khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta.
3. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian di bidang partisipasi politik dan dimensi-dimensi politik di level individu calon pemilih pemula, dan warganegara Indonesia pada umumnya.

LANDASAN TEORI

Penelitian yang Relevan

Eldin Fahmy dalam sebuah penelitiannya mengungkap bahwa *political trust* dan *political efficacy* memiliki pengaruh yang sedikit (minor) terhadap keterlibatan seseorang di dalam aktivitas politik atau partisipasi politik (Fahmy, 2006: 86). Faktor yang lebih berpengaruh adalah *Political Interest* dan *Political Knowledge*. Dalam kesimpulannya, Fahmy menyebutkan bahwa orientasi kognitif seperti *Political Interest*, *Political Knowledge*, dan Keyakinan Politik merupakan prediktor yang paling besar atas keterlibatan warganegara dalam politik ketimbang orientasi afektif seperti *Political Trust* dan *Political Efficacy*.

Kajian dari Frane Adam menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *Political Trust* dengan partisipasi politik (Schyns and Nuus, 2007: 95). Ia menyebutkan bahwa semakin rendah *political trust*, maka semakin tinggi partisipasi politik warganegara untuk terlibat. Ini akibat mereka berupaya mengambil langkah sendiri akibat pemimpin politik atau pejabat publik sudah tidak mereka percayai lagi.

Level *political efficacy* secara konsisten diidentifikasi selaku faktor yang mendorong munculnya partisipasi di sistem politik Amerika Serikat (Garcia and Sanchez, 2004: 137). *Political Efficacy*, atau meningkatnya kepercayaan dan perasaan terlibat dalam lembaga pemerintah dan politik, terhubung dengan meningkatnya tingkat partisipasi politik. Ola Listhaug menyatakan bahwa meningkatnya tingkat *political efficacy* dan kecenderungan warganegara untuk terlibat dalam diskusi dengan warganegara lainnya, mendorong peningkatan bentuk partisipasi politik yang menuntut keahlian dan motivasi dari warganegara itu sendiri (Listhaug, 2006: 223).

Carole Pateman menyatakan bahwa orang yang punya *political efficacy* lebih suka melibatkan diri dalam partisipasi politik ketimbang mereka yang kurang memilikinya. *Political efficacy* adalah perasaan umum seputar efektivitas pribadi mereka yang meliputi kepercayaan diri dalam melakukan perubahan dunia di sekitarnya. Orang yang merasa efektif di dalam kehidupan sehari-hari dan suka tantangan adalah mereka yang juga lebih suka terlibat dalam partisipasi politik (Pateman, 1999: 46).

Amitai Etzioni dalam kajiannya di Amerika Serikat, mensinyalir adanya hubungan erat antara *political disaffection* (rendahnya *political efficacy* dengan partisipasi politik. Etzioni mengungkap fakta bahwa berkurangnya animo memberi suara dalam pemilu ada pengaruh dari political disaffection di sementara warganegara Amerika Serikat. Peningkatan apatisme pemberian suara seiring dengan perkembangan *political disaffection* (Etzioni, 1995: 192).

Political disaffection cenderung mengarahkan pada rendahnya perilaku pemberian suara (partisipasi politik) dan secara simultan cenderung mempertinggi keterlibatan politik dalam konteks partisipasi politik non konvensional yang dilandasi rasa frustrasi dari sejumlah kelompok sosial (Dodd, 1980: 86). Instabilitas politik suatu sistem politik dipertaruhkan dengan tingginya *political disaffection* ini.

Konsep-konsep dalam Penelitian

Partisipasi politik menurut Sidney Verba, et.al. adalah tindakan-tindakan legal yang dilakukan warganegara biasa yang lebih atau kurangnya dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil sehubungan dengan itu (Verba, et.al., 1980: 1). Definisi Verba, et.al. meliputi tindakan warganegara biasa (bukan pejabat publik) dalam konteks pemilihan pejabat publik dan segala tindakan yang diambil warganegara sehubungan dengan hal tersebut.

Anthony Harold Birch mendefinisikan partisipasi politik sebagai partisipasi dalam proses pemerintahan, dan dalam kasus partisipasi politik secara esensial adalah kasus di mana warganegara biasa (sebagaimana dibedakan dengan pejabat publik atau politisi yang dipilih) mengambil bagian dalam proses proses di mana pemimpin poitik dilipih dan atau kebijakan pemerintah disusun dan diimplementasikan (Birch, 2007: 144). Menurut Birch, tindak partisipasi politik tidak hanya berlingkup pada mekanisme pemilihan umum tetapi juga meliputi tindakan warganegara dalam penyusunan dan pengimplementasian sebuah kebijakan.

Pranab Mangaraj dalam studinya mengenai partisipasi suku-suku di India mendefinisikan partisipasi politik sebagai :

"sejauh mana individu terlibat

> dalam segala tingkatan sistem politik ... yang meliputi baik kegiatan politis atau kuasi-politis dan bisa diterapkan pada setiap jenis sistem politik [dimana] bentuk dan sifat partisipasi tersebut bisa saja berbeda antara satu sistem politik dengan lainnya bergantung pada sejauh mana individu menerima rangsangan politik [sosialisasi politik], karakteristik personal dan sosialnya, dan setting lingkungan di mana individu berada." (Mangaraj, 2003: 147).

Tatkala voting dan keanggotaan dalam partai, selaku modus partisipasi politik konvensional menurut, sejumlah peneliti beranjak ke aspek yang lebih luas dari partisipasi politik.Ini misalnya ditunjukkan oleh Antoinette Pole lewat kajiannya atas bentuk partisipasi politik blogging. Lewat sebuah kutipannya, Pole menyatakan bahwa :

> "partisipasi demokratis yang bermakna mensyaratkan suara warganegara dalam masalah politik jelas, keras, dan sama: jelas sehingga pejabat publik tahu apa yang warganegara ingin dan butuh, keras sehingga pejabat punya insentif untuk memberi perhatian atas apa yang ia dengar, dan sama sehingga gagasan demokratis soal tanggapan yang sama atas semua suara tidak dilanggar." (Pole, 2010: 4).

Definisi lain dari partisipasi politik diajukan oleh Paul F. Whiteley and Patrick Seyd (Whiteley and Seyd, 2002: 1). Menurut mereka, partisipasi politik adalah "aktivitas yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau personil negara dan pemerintahan ... partisipasi jenis ini mengacu pada aktivitas seperti kampanye, pengorganisasian, penggalangan dana, dan mendatangi pertemuan-pertemuan sebagaimana mencari dan memperoleh posisi terpilih" (Whiteley and Seyd, 2002: 1).

Sidney Verba and Norman H. Nie mendefinisikan partisipasi politik sebagai "segala kegiatan yang dilakukan oleh warganegara biasa yang langsung atau tidak langsung ditujukan demi mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah dan atau segala tindakan yang mereka lakukan sehubungan dengan maksud tersebut" (Verba and Nye, 1987: 2). Definisi Verba dan Nie termasuk tindakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Keduanya juga memperhatikan partisipasi di luar bentuk pemberian suara saat pemilu dan kegiatan kampanye (Verba and Nye, 1987: 2).

Definisi pemungkas bagian ini kami ajukan dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yang menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah : (Budiardjo, 2008: 368).

> " ... kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif." *[... activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneus, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*].

Tidak seluruh warganegara berperan aktif dalam partisipasi politik.Bagian terbesar dari warganegara sekadar berpartisipasi politik di saat Pemilu saja. Sebagian kecil lainnya memang aktif berpolitik, dan sebagian kecil lainnya bahkan sama sekali tidak berpartisipasi politik termasuk di saat Pemilu mereka tidak memilih (golput).

Pemetaan seputar pola partisipasi politik di kalangan warganegara diantaranya dilakukan oleh Lester W. Milbrath dan M.

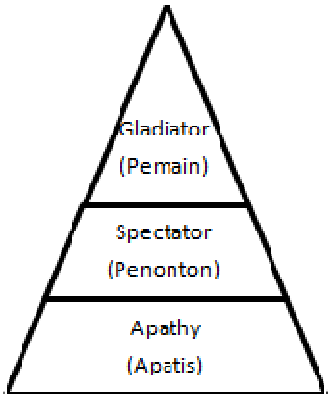

Gambar 1 : *Tipe Partisipan versi Milbrath and Goel*

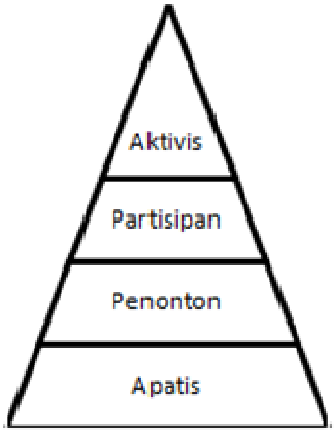

Gambar 2: *Tipe Partisipan versi Roth*

Goel serta David F. Roth dan Frank L. Wilson. Milbrath dan Goel membagi pola menjadi 3 yaitu Gladiator, Spektator, dan Apatis. Roth dan Wilson membaginya menjadi 4 yaitu Aktivis, Partisipan, Penonton, dan Apolitis (Budiardjo, 2008: 372-3).

Milbrath dan Goel menyatakan bahwa 5 sampai 7 persen populasi warganegara termasuk Gladiator, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Spektator atau penonton meliputi 60% populasi warganegara yang menunjukkan aktif dalam partisipasi politik secara minimal, termasuk sekadar menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sisanya, yaitu 33% termasuk mereka yang Apatis, yaitu orang yang sama sekali tidak aktif dalam partisipasi politik, bahkan tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut Roth dan Wilson, Aktivis termasuk Deviant (pembunuh dengan maksud politik, pembajak, teroris), pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik atau kelompok kepentingan. Partisipasi adalah orang yang bekerja untuk kampanye, anggota aktif partai politik, partisipan aktif kelompok kepentingan dan tindakan yang bersifat politik, orang yang terlibat dalam komunitas. Penonton adalah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota kelompok kepentingan, pelobby, pemilih dalam pemilu, orang yang terlibat dalam diskusi politik, dan pemerhati pembangunan politik (komentator). Apolitis adalah serupa dengan pemetaan oleh Milbrath dan Goel.

Variabel Partisipasi Politik

Variasi variabel guna mengukur konsep partisipasi politik bertebaran di aneka hasil penelitian. Sidney Verba dan Norman H. Nie membagi jenis partisipasi politik warganegara menjadi : (Verba and Nye, 1987: 31)

1. Memberi suara secara teratur di tiap pemilu presiden.
2. Selalu memberi suara di tiap pemilihan kepala daerah.
3. Sekurangnya aktif terlibat dalam satu organisasi yang berhubungan dengan masalah komunitas.
4. Bekerja sama dengan orang lain dalam upaya menyelesaikan masalah komunitas.
5. Pernah berupaya membujuk orang lain untuk memiliki seperti pilihannya.
6. Pernah bekerja secara aktif untuk satu partai atau caleg selama periode pemilu.
7. Pernah menghubungan pejabat pemerintah tentang suatu masalah atau isu.
8. Pernah datang ke pertemuan atau rally politik 3 tahun terakhir.
9. Pernah menghubungi pemerintah daerah atau pusat sehubungan suatu isu atau masalah.

10. Pernah mendirikan kelompok atau organisasi yang berupaya menyelesaikan masalah komunitas lokal.
11. Pernah menyumbang uang untuk partai atau caleg selama kampanye.
12. Menjadi anggota organisasi atau klub politik.

Jenis partisipasi politik lainnya diutarakan oleh Robert G. Burgess, yang meliputi sebagai berikut : (Jary, 1986: 15).

1. Partisipasi dalam partai politik
2. Keanggotaan dalam organisasi
3. Partisipasi politik informal dan orientasi umum atas politik, misalnya : (1) menulis surat kepada politisi, (2) pengetahuan politik.
4. Dukungan atas demokrasi dan perasaan individu atas *political efficacy*, kepuasan, dan sejenisnya.
5. Aksi langsung dan potensi protes .

Ukuran lainnya dilakukan oleh Ganapthy Palanithurai dan Swati Sucharita Nanda, yang meliputi : (Pananithurai and Sucharita, 2007: 113).

1. Voting di tempat pemungutan suara
2. Mendukungn kelompok atau partai politik lewat keanggotaan,
3. Menghubungi politisi secara personal untuk tiap tindakan politik,
4. Berpartisipasi di pertemuan partai politik,
5. Mengkomunikasi pesan pada warganegara lain seputar proses politik.

Political Trust

Secara sederhana, *Political Trust* didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa pejabat publik adalah jujur dan kompeten dalam tugasnya (LeRoy, 2009: 29). *Political Trust* juga adalah sejauh mana warganegara merasa bahwa pemerintahnya kompeten, jujur, dan menghargai dukungan yang mereka berikan (Beck and Pierce, 1977: 27).

Definisi lain seputar *Political Trust* dirangkai dengan penjelasan mengenai partisipasi politik dan *political efficacy*, seperti dikutip oleh Carole Hahn : (Hahn, 1998: 20).

> "Partisipasi politik adalah keterlibatan yang diharapkan atau yang aktual dalam kegiatan politik, termasuk mendiskusikan isu-isu politik dan mendatangi pertemuan politik. *Political efficacy* adalah kepercayaan atau perasaan bahwa warganegara punya kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Political trust adalah perasaan yakin dan percaya di dalam diri seseorang atas pejabat politik.

Robert A. Heineman mendefinisikan *political trust* sebagai alat menentukan seberapa tinggi kepercayaan warganegara kepada pemerintah. Kepercayaan tersebut berhubungan langsung dengan sejauh apa pemerintah dianggap *legitimate* atau tidak. Semakin sejahtera suatu bangsa umumnya semakin tinggi pula kepercayaan publiknya ketimbang negara yang kurang sejahtera (Heineman, 1996: 94).

Secara lebih komprehensif, definisi *political trust* diajukan oleh Li Lianjiang seperti dikutip oleh Thomas Heberer and Gunther Schubert : (Schubert, 2009: 70).

> "*political trust* biasanya didefinisikan sebagai keyakinan warganegara bahwa pemerintah atau sistem politiknya akan memproduksi hasil yang konsisten dengan harapan mereka ... ia merupakan komponen penting bagi dukungan politik, yang membangun legitimasi sistem politik. Warganegara yang mempercayai pemerintahnya biasanya patuh kepada hukum, mendukung inisiatif pemerintah, dan mengikuti kepemimpinan politik tanpa perlu dipaksa. Tingkat political trust yang tinggi juga berhubungan dengan ren-

dahnya partisipasi politik yang dimobilisasi.

Dimensi Political Trust

David Easton mengklasifikasi masalah *political trust* warganegara ke dalam 5 ranah yaitu : (1) Aktor politik, termasuk pejabat politik terpilih dan para pimpinan politik; (2) Lembaga milik rezim, termasuk komisi pemilihan umum, lembaga pengatur, lembaga pelayanan publik; (3) Kinerja rezim, termasuk bagaimana warganegara menilai jalannya negara; (4) prinsip rezim, termasuk dukungan atas gagasan dasar demokrasi, dan (5) komunitas politik, termasuk identifikasi warganegara terhadap bangsa (Listhaug and Ringdal, 2008: 132).

Soren Holmberg, dengan memodifikasi pendapat David Easton, membagi dimensi *political trust* menjadi 5 yaitu : (1) Komunitas politik; (2) Prinsip rezim; (3) Kinerja rezim; (4) Lembaga rezim; dan (5) Pemimpin politik (Holmberg, 1999: 103).

Political Efficacy

Political Efficacy adalah hingga derajat mana warganegegara merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi keputusan politik. Tingkat *political efficacy* berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan warganegara. Semakin terdidik dan semakin besar penghasilan warganegara, semakin besar pula tingkat *political efficacy* di dalam diri mereka (Heineman, 1996: 94).

Dengan mengutip Campbell et.al., Eldin Fahmy mendefinisikan *political efficacy* sebagai " ... perasaan bahwa tindakan politik seorang individu dapat berdampak atas proses politik ... perasaan tersebut bahwa perubahan sosial dan politik adalah mungkin dan bahwa warganegara tersebut dapat memainkan peranan dalam membuat perubahan tersebut (Fahmy, 2006: 72)

Barrie Axford, et.al. mendefinisikan *political efficacy* sebagai "sejauh mana individu merasa keterlibatan dirinya dalam politik akan efektif (Axford, et.al., 2002: 145). *Political efficacy* penting dalam mempengaruhi partisipasi politik. *Political efficacy* jelas terhubung dengan psikologi individu dan hubungan emosional yang mereka miliki dengan praktek politik baik dari para aktor maupun lembaga politik. Perasaan punya kekuatan dan tidak punya kekuatan nyata berhubungan dengan sikap dan nilai budaya, juga pengalaman yang mereka miliki. Rendahnya *political efficacy* mendorong munculnya *political disaffection.*

Political disaffection termasuk salah satu konsep yang kurang terdefinisikan dalam kajian psikologi politik. Namun, kajian ini cukup bermakna terutama guna meneliti rendahnya dukungan dan minat warganegara untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Political disaffection adalah "perasaan ketidakberdayaan subyektif, sinisme, dan kurangnya keyakinan diri dihubungkan dengan proses politik, politisi, dan lembaga demokrasi, tetapi tanpa mempertanyakan rezim politik yang bersangkutan" (Torcal and Montero, 2006: 6). Menurut Torcal dan Montero, *political disaffection* kondusif memperlebar jarak antara warganegara dengan wakil-wakil mereka, menguatkan ketimpangan politik, dan membuat perubahan institusi dan politik semakin sulit. *Political disaffection* juga mempertinggi apatisme politik di segala bentuk partisipasi politik.

Mariano Torcal dan Jose Ramon Montero menggunakan konsep *political efficacy* guna mengukur konsep *political disaffection* (Torcal and Montero, 2006: 16). Konsep *external political efficacy* digunakan untuk mengukur *institutional disaffection*, sementara konsep *internal political efficacy* digunakan untuk mengukur konsep *political disengagement* (Lipset and Schneider, 1983: 379-403).

Political disaffection dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu: (1) *institutional disaffection* dan (2) *political disengagement*

(Torcal and Montero, 2006: 6-7). *Institutional disaffection* adalah keyakinan kurangnya responsivitas lembaga dan otoritas politik serta kurangnya kepercayaan warganegara atas lembaga politik di negara masing-masing. Sementara itu, *political disengagement* adalah kelompok sikap yang berhubungan dengan ketidakpercayaan umum atas politik serta kurangnya warganegara terlibat dalam proses politik.

Dimensi Political Efficacy

Political efficacy terbagi dua, yaitu *internal political efficacy* dan *external political efficacy*. *Internal political efficacy* mengacu pada perasaan warganegara seputar kemampuannya untuk memahami dan secara efektif ambil bagian dalam politik. *External political efficacy* fokus pada persepsi warganegara seputar respon dari lembaga politik dan aktor politik atas tuntutan warganegara (Best and Radcliff, 2005: 536). Variabel *political efficacy*, baik dimensi internal maupun eksternal berada di ranah psikologi (subyektif) warganegara.

Hipotesis

H0 : *Political Trust* dan *Political Efficacy* tidak mempengaruhi Partisipasi politik calon pemilih pemula.

H1 : *Political Trust* dan *Political Efficacy* mempengaruhi Partisipasi politik pemilih pemula.

Operasionalisasi Konsep

Definisi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian :

Political Trust :

kepercayaan bahwa pejabat publik adalah jujur dan kompeten dalam tugasnya.

Aktor Politik :

Pemimpin partai politik, negarawan, anggota legislatif, atau mereka yang dianggap memegang kekuasaan.

Lembaga Politik :

Lembaga yang anggotanya tersusun lewat mekanisme pemilihan umum seperti DPR, Presiden, Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah.

Kinerja Rezim:

Tindakan-tindakan pemimpin politik dan negara yang berkaitan dengan pemenuhan janji masa kampanye.

Prinsip Rezim:

Pandangan bahwa rezim pemerintahan tetap memperhatikan kesejahteraan warganegara secara umum sesuai dengan konstitusi.

Komunitas Politik:

Kepercayaan antar warganegara bahwa mereka merupakan satu bangsa yang diikat dengan persamaan kepentingan.

Political Efficacy:

Hingga derajat mana warganegegara merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi keputusan politik.

Internal Political Efficacy:

Perasaan warganegara seputar kemampuannya untuk memahami dan secara efektif ambil bagian dalam politik.

External Political Efficacy:

Persepsi warganegara seputar respon dari lembaga politik dan aktor politik atas tuntutan warganegara.

Partisipasi Politik:

Kegiatan warga yang bertindak sebagai pri-

Gambar 3 :Model Analisis

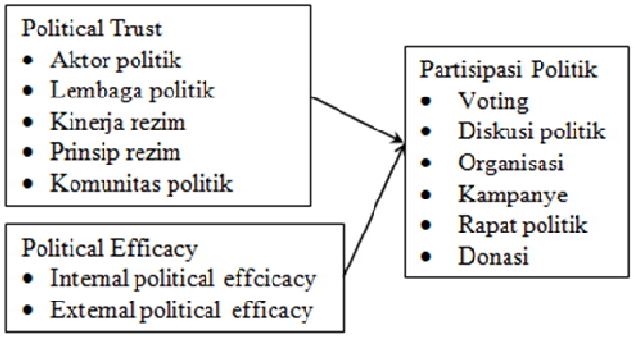

badi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Voting:

Pemberian suara dalam pemilihan umum baik untuk memiliki anggota parlemen ataupun kepala pemerintahan.

Diskusi Politik:

Membicarakan masalah politik dengan orang lain.

Organisasi:

Terlibat dalam organisasi yang bekerja untuk kepentingan komunitas masyarakat.

Kampanye:

Ikut serta dalam kampanye seorang calon pemimpin termasuk membujuk orang lain untuk ikut serta atau memilih calon sesuai pilihannya.

Rapat Politik:

Ikut serta dalam pertemuan, rapat umum, yang diadakan calon pejabat atau partai politik baik di masa kampanye atau bukan.

Donasi:

Menyumbangkan sesuatu baik pikiran, tenaga, atau sumber daya dalam kegiatan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif-eksplanatif karena bertujuan menyajikan paparan data sekaligus menyelidiki hubungan antar variabel penelitian. Metodologi penelitian yang dikembangkan adalah kuantitatif dalam arti konsep-konsep penelitian diderivasi menjadi serangkaian variabel yang diukur hubungannya dalam angka dengan statistik deskriptif dan inferensial sebagai metode analisis datanya.

Populasi penelitian adalah warganegara biasa yang termasuk kategori siswa sekolah lanjutan atas tingkat akhir dengan dua kategori yaitu Unit Sekolah Menengah Atas dan Unit Sekolah Menengah Kejuruan. Kedua unit tersebut memiliki perbedaan dalam kurikulumnya: SMA lebih menekankan pada aspek teoritis sementara SMK menekankan pada aspek praktik. Sampel akan diambil menggunakan *Purposive Random Sampling*, dengan makna peneliti akan menentukan sampel berdasarkan orang-orang yang dianggap memenuhi kriteria sebagai pemilih pemula di suatu lokasi sekolah. Pada lokasi sekolah akan diambil dua jenjang pendidikan tingkat atas yang masing-masing akan diambil sebanyak 80 dan 85 orang sehingga total sampel yang digunakan sebesar 165 pemilih pemula.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Angket, yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden. Item-item dalam kuesioner diukur dalam Skala Likert. Poin 1 sebagai titik terendah sikap Tidak Setuju dan poin 10 sebagai tingkat tertinggi dari sikap Setuju. Skala data yang digunakan masuk ke dalam skala interval karena nilainya pasti tetapi relatif dan bersifat kategoris.

Teknik uji statistik guna menentukan pengaruh Variabel *Political Trust* (X1) dan *Political Efficacy* (X2) terhadap Variabel Partisipasi Politik (Y) adalah Regresi Linear Berganda. Analisis ini bertujuan mencari kesimpulan apakah kedua prediktor, *Political Trust* dan *Political Efficacy* mempengaruhi partisipasi politik warganegara.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Unit Sekolah

Komposisi responden sebesar 89 siswa atau 53,9% berasal dari SMA sementara dari SMK sebesar 76 siswa atau 46,1%. Dengan demikian, secara asal unit, responden lebih banyak berasal dari SMA.

Jenis Kelamin

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 73 orang atau 44,2% , sementara responden perempuan sebanyak 91 orang atau meliputi 55,2%. Dengan demikian, berdasarkan jenis kelamin responden lebih banyak perempuan.

Jurusan

Komposisi responden berdasarkan jurusan adalah sebanyak 47 atau 28,5% dari IPA, 42 orang atau 25,5% dari IPS, 44 orang atau 26,7% dari Bisnis Manajemen, dan 32 orang atau 19,4% dari Teknologi. Masing-masing jurusan memiliki karakteristik kurikulumnya masing-masing.

Aktivitas dalam Organisasi Intra Sekolah

Komposisi responden yang aktif dalam kegiatan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) adalah 10 orang atau 6,1% yang mengikutinya, sisanya yaitu 155 orang atau 93,9% tidak terlibat di dalam kegiatan OSIS.

Keluarga Ada yang Aktif di Kegiatan Politik

Komposisi responden di mana anggota keluarganya ada yang aktif dalam kegiatan politik, sebanyak 16 orang atau 9,7% menyatakan Ada sementara siswa sebesar 149 orang atau 90,3% menyatakan tidak ada. Hal ini menunjukkan sedikit sekali keluarga responden yang aktif dalam kegiatan politik.

Political Trust

Political trust adalah kepercayaan bahwa pejabat publik adalah jujur dan kompeten dalam tugasnya.

Aktor Politik

Dalam menilai pernyataan "Pemerintah Indonesia selalu memperhatikan kepentingan rakyat,", total responden memiliki nilai mean 5,32 dalam skala 1 – 10 dalam hal *political trust* terhadap para aktor politik. Nilai mean ini memiliki standar deviasi sebesar 1,827 dan ditaksir memiliki penyimpangan yang rendah. Nilai mean 5,32 ini kurang menggembirakan sehubungan dengan penilaian mereka terhadap pemerintah dikaitkan perhatiannya terdapat rakya.

Lembaga Politik

Dalam menilai pernyataan "Orang-orang di pemerintahan Indonesia menjunjung tinggi kepercayaan rakyat" nilai mean dari total responden adalah 5,14 dengan standar deviasi 1,912. Nilai ini lebih rendah dari pernyataan yang pertama. Responden kurang memiliki persepsi positif seputar amanahnya para pejabat di dalam pemerintahan.

Kinerja Rezim

Dalam menilai pernyataan "Orang-orang yang menjabat di pemerintahan Indonesia adalah ahli dan cocok untuk jabatannya" atau meritokrasi, sikap responden memiliki nilai mean 4,89 dengan standar deviasi 2,003. Nilai ini lebih rendah dari pada penilaian responden akan aktor politik dan kinerja rezim. Meritokrasi para pejabat memiliki apresiasi yang lebih kurang positif lagi.

Prinsip Rezim

Dalam menilai pernyataan "Orang-orang yang duduk di dewan perwakilan rakyat maupun eksekutif (presiden, gubernur, walikota) bertindak jujur dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat", sikap responden diwakili oleh nilai mean sebesar 4,77 dengan standar deviasi 2,243. Dalam masalah prinsip kejujuran persepsi responden lebih kecil dari masalah meritokrasi. Ini mengindikasikan persepsi yang tidak terlampau positif sehubungan dengan integritas kejuruan para pejabat publik.

Komunikasi Politik

Dalam menilai pernyataan "Kepercayaan rakyat selalu dijunjung tinggi oleh para pejabat di Indonesia" atau terkait dengan masalah amanah dalam memikul kepercayaan, sikap responden diwakili nilai mean sebesar 4,90 dengan standar deviasi 2,136. Hal ini juga terasa kurang menggembirakan yaitu tanggapan responden atas aspek amanah ini.

Politcal Efficacy

Political efficacy adalah hingga derajat mana warganegegara merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi keputusan politik.

Internal Political Efficacy

Perasaan warganegara seputar kemampuannya untuk memahami dan secara efektif ambil bagian dalam politik. Dalam masalah *internal political efficacy ini* responden diwakili oleh nilai mean 5,64 dengan standar deviasi 1,519. Nilai ini mengindikasikan adanya kecenderungan, meskipun kecil, bahwa responden memiliki *internal political efficacy* yang tidak terlampau negatif. Ada harapan di masa datang bahwa *internal political efficacy* ini akan meningkat seiring munculnya wawasan-wawasan baru politik di dalam diri mereka.

External Political Efficacy

Persepsi warganegara seputar respon dari lembaga politik dan aktor politik atas tuntutan warganegara. Sehubungan dengan masalah *external political efficacy* ini responden memiliki sikap yang diwakili nilai mean 4,33 dengan standar deviasi 1,826. Nilai ini lebih rendah dari *internal political efficacy* dan menunjukkan bahwa responden merasa diri mereka lemah apabila diperhadapkan dengan lembaga-lembaga serta aktor-aktor pemerintahan. Perlu dibangun kepercayaan diri mereka dalam menghadapi mereka di masa mendatang, bahwa warganegara adalah yang dilayani sementara pejabat pemerintah adalah yang melayani.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Ikut Voting

Dalam menilai pernyataan "Saya akan ikut menyontreng dalam pemilu presiden, legislatif, atau pilkada" responden yang sesungguhnya memiliki hak pilih untuk pilpres 2019 mendatang, hanya diwakili nilai mean sebesar 8,17 dengan standar deviasi 2,342. Kendati nilai ini cukup besar, tetapi selayaknya nilai mean adalah 10 karena mereka sesungguhnya berhak untuk ikut voting.

Diskusi Politik

Dalam menilai pernyataan "Saya suka membicarakan masalah politik dengan keluarga, teman, ataupun tetangga" responden diwakili oleh nilai mean 5,12 dengan standar deviasi 2,491. Ini bermakna hanya sekitar setengah saja responden yang aktif dalam diskusi politik dalam beragam bentuk.

Berorganisasi

Dalam menilai pernyataan "Saya senang berorganisasi di lingkungan tempat tinggal untuk menyelesaikan masalah bersama" nilai mean yang diperoleh sebesar 6,21 dengan standar deviasi 2,634. Ini mengindikasikan bahwa responden cenderung senang berorganisasi dengan warga di lingkungannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan (musyawarah). Ini merupakan hal yang cukup menggembirakan bagi antisipasi mereka atas problem-problem publik.

Kampanye

Dalam menilai pernyataan "Saya suka mempromosikan calon yang saya dukung kepada keluarga, teman, teman, ataupun masyarakat" nilai mean yang diperoleh sebesar 4,26 dengan standar deviasi 2,641. Nilai ini mengindikasikan bahwa memang berhubung mereka masih berkategori pemilih pemula, persoalan -persoalan kampanye yang rumit belum masuk prioritas kegiatan politik mereka.

Rapat Politik

Dalam menilai pernyataan "Saya suka menghadiri pertemuan yang membahas masalah politik" para responden diwakili nilai mean sebesar 3,65 dengan standar deviasi

2,365. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden secara umum kurang tertarik dalam aktivitas rapat politik.

Donasi Politik

Dalam menilai pernyataan "Saya pernah menyumbang pikiran atau tenaga atau lainnya kepada salah satu caleg atau partai" responden diwakili nilai mean sebesar yang paling kecil di antara lainnya yaitu sebesar 3,10 dengan standar deviasi 2,423. Tentu saja, hal ini wajah mengingat aktivitas utama para responden adalah belajar dan bukan membantu kegiatan politik praktis.

Uji Asumsi

Ukuran Sampel

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Salah satu syarat dalam uji ini adalah ukuran sampel dengan ketentuan :

n > 50 + 8m

Dimana :

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah Variabel Bebas

Hal ini sudah dapat dipenuhi mengingat jumlah sampel yang digunakan sebesar 165 sementara sampel minimal yang dibutuhkan 50+8.2 yaitu 66.

Normalitas Residu

Pada grafik Normal P-P Plot, residu yang normal adalah data memencar mengikuti fungsi distribusi normal yaitu menyebar seiring garis z diagonal. Melalui pengujian dengan SPSS, normalitas residu dapat dilihat pada Gambar 3.

Plot-plot data cenderung mengikuti garis diagonal z dan dinyatakan bahwa residu bersifat normal.

Multikolinieritas

Multikolinieritas antar variabel bebas diasumsikan untuk tidak terjadi. Dalam uji regresi dengan SPSS, multikolinieritas dapat

Tabel 1 : *Coefficient*

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	x1_pol_trust	,516	1,939
	x2_pol_efficacy	,516	1,939
a. Dependent Variable: y_partis_pol			

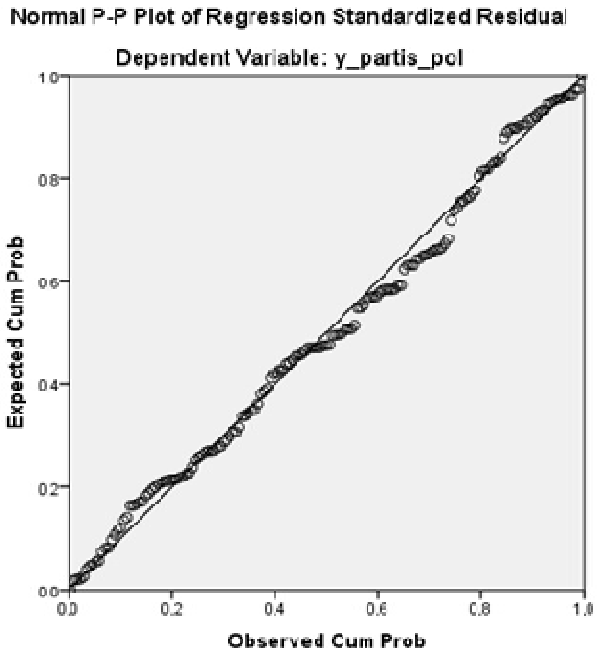

Gambar 3 : *Normalitas Residu*

dilihat pada Tabel Coefficients, yaitu nilai Tolerance dan nilai VIF.

Nilai Tolerance menunjukkan 0,516 dan VIF sebesar 1,939. Nilai Tolerance yang mengindikasikan terjadinya multikolinieritas adalah < 0,1. Nilai Tolerance penelitian adalah 0,516 dan dengan demikian > 0,1 dan dengan demikian dapat dikatakan multikolinieritas antar variabel bebas tidak terjadi. Nilai VIF yang mengindikasikan terjadinya multikolinieritas adalah > 10. Nilai VIF penelitian ini sebesar 1,939 dan dengan demikian < 10, sehingga dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Autokorelasi

Autokorelasi disebut juga *independent errors.*

Regresi linier berganda menghendaki residu hasil observasi tidak berkorelasi (harus bebas). Untuk mendiagnosis apakah terjadi autokorelasi, digunakan nilai Durbin Watson.

Durbin Watson mendiagnosis apakah residual yang berdekatan saling berkorelasi. Hasil Durbin Watson berkisar dari 0 sampai dengan 4. Nilai 2 mengindikasikan residu tidak saling berkorelasi, > 2 mengindikasikan korelasi negatif, sementara < 2 mengindikasikan korelasi positif.

Nilai Durbin Watson hitung sebesar 2,116 (lihat Tabel Model Summary), nilai Durbin Watson upper tabel sebesar 1,7576. Dengan demikian kondisi autokorelasi tidak terjadi.

Homoskedastisitas

Homoskedastisitas terjadi jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit.

Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari plot data. Plot data juga menyebar dikiri-kanan atau atas-bawah garis 0. Dengan demikian dapat dikatakan homoskedastisitas terjadi dan heteroskedastisitas tidak terjadi.

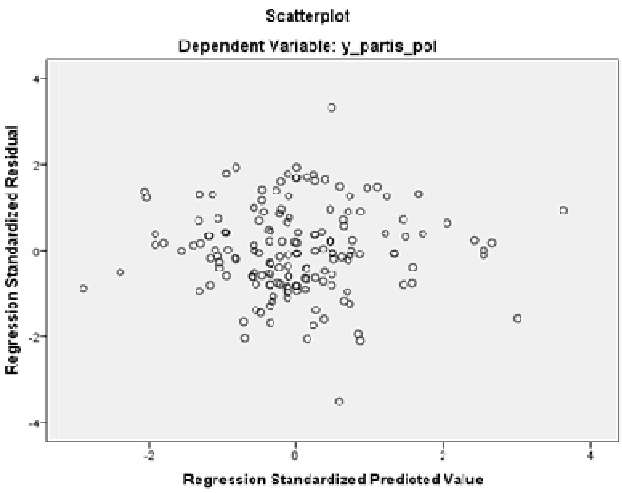

Gambar 4 : *Homoskedastisitas*

Tabel 2 : *ANOVA*

Model		F	Sig.
1	Regression	46,791	,000[b]
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: y_partis_pol

b. Predictors: (Constant), x2_pol_efficacy, x1_pol_trust

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan data hasil olahan SPSS yaitu yang terdapat pada Tabel ANOVA. Akan diperbandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X1 *Political Trust* dan X2 *Political Efficacy* secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y Partisipasi Politik.

H0 : F hitung < F tabel

H1 : F hitung > F tabel

F hitung penelitian adalah 46,791 dengan signifikansi hitung 0,000. F tabel adalah 2,426. Dengan demikian, di dalam taraf keyakinan penelitian 95% H0 ditolak dan H1 diterima. Pengaruh *Political Trust* dan *Political Efficacy* terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula adalah signifikan..

Pengaruh Political Trust dan Political Efficacy terhadap Partisipasi Politik

Pengaruh *political trust* dan *political efficacy* secara serentak memiliki dampak terhadap partisipasi politik para calon pemilih muda. Namun, dampak ini terjadi dengan catatan apabila kedua variabel bebas tersebut dipasangkan secara bersama. Ini belum lagi dengan tinjauan apabila hanya salah satu dari kedua variabel diidentifikasi pengaruhnya terhadap partisipasi politik para calon pemilih pemula.

Nilai koefisien determinasi kedua variabel bebas sebesar 0,605 x 100% = 60,5. Nilai ini cukup tinggi karena hanya 39,5% partisipasi politik dipengaruhi oleh aneka variabel bebas lain yang tidak disertakan di dalam

penelitian ini . Namun apakah adanya kepercayaan bahwa pejabat publik sebagai jujur dan kompeten dalam tugasnya ataukah hingga derajat mana para calon pemilih pemula merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi keputusan politik, yang sesungguhnya memiliki dampak besar terhadap keputusan para calon pemilih pemula untuk berpartisipasi politik.

Sifat hubungan antara *political trust* dan *political efficacy* terhadap partisipasi politik keduanya bersifat positif. Artinya, semakin tinggi *political trust* dan *political efficacy* maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik para calon pemilih pemula. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan pada bagian landasan teori mengenai korelasi *political trust* dan *political efficacy* terhadap partisipasi politik.

Apabila dilakukan tinjauan seputar sumbangan variabel bebas secara individual terhadap partisipasi politik, maka terdapat kondisi yang berbeda. *Political trust* dalam penelitian ini, secara individual tidak memiliki dampak terhadap partisipasi politik para calon pemilih pemula, yang dibuktikan nilai t hitungnya lebih kecil dari t tabel (0,165 < 1,974) dan dampaknya tidak signifikan dengan signifikansi hitung di atas signifikan penelitian (0,165 > 0,05). Hal ini memberi gambaran bahwa *political trust* dalam penelitian ini hanya memiliki nilai mean sebesar 5 dalam skala 1 – 10. Atau dengan kata lain, kepercayaan para calon pemilih pemula terhadap para aktor dan lembaga politik yang ada berada dalam posisi yang ambigu antara yakin dan tidak yakin. Mungkin hal ini diakibatkan oleh sejumlah alasan seperti masih mudanya usia, belum terbukanya wawasan yang cukup karena mereka belum pernah mengikuti pemilu yang sesungguhnya, atau mereka telah mendapat masukan yang cukup berarti dari orang-orang di sekeliling yang pendapatnya mereka patuhi seputar kinerja aktor dan lembaga politik. Untuk menelusuri hal tersebut tentu diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Sifat hubungan variabel *political trust* dengan partisipasi politik adalah positif. Semakin tinggi *political trust* maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik.

Pada sisi lain, *political efficacy* memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik. Nilai t hitung *political efficacy* lebih besar dari t tabel, yaitu 6,830 > 1,974. Dampak *political efficacy* terhadap partisipasi politik juga sangat signifikan karena nilai signifikansi hitung yang sangat kecil yaitu 0,00 < 0,05. *Political efficacy* terdiri atas 2 kondisi yaitu *internal political efficacy* dan *external political efficacy.*

Internal political efficacy adalah perasaan para calon pemilih pemula seputar kemampuan mereka memahami dan secara efektif ikut ambil bagian dalam politik. Nilai mean *internal political efficacy* adalah 5,64 dan ini lebih besar dari nilai mean *political trust.* Hal ini merupakan temuan yang cukup positif dengan mana para calon pemilih pemula memiliki keyakinan bahwa diri mereka sendiri akan mampu memahami dan secara efektif ikut ambil bagian dalam beraneka jenis partisipasi politik.

Untuk *external political efficacy*, yaitu persepsi para calon pemilih pemula atas aneka respon atau tanggapan para aktor politik ataupun lembaga politik terhadap diri mereka, nilainya kurang menggembirakan yaitu dengan nilai mean yang hanya sebesar. 4,33. Nilai *external political efficacy* ini lebih rendah dari *internal political efficacy* tetapi hampir serupa rendahnya dengan *political trust.*

Pandangan para calon pemilih pemula mengenai aktor dan lembaga politik kurang positif. Perlu tentunya diadakan penelitian lanjutan yang mampu mengidentifikasi mengapa pandangan para calon pemilih pemula, yang secara usia masih muda, kurang memiliki persepsi yang tinggi terhadap kinerja para aktor dan lembaga politik. Sifat hubungan antara *political efficacy* dengan

partisipasi politik adalah positif, dengan mana apabila satu variabel meningkat maka variabel lainnya pun mengalami peningkatan yang serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka hal-hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan ini adalah:

1. Secara simultan, *political trust* dan *political efficacy* memiliki dampak terhadap partisipasi politik para calon pemilih pemula.
2. Secara individual, *political trust* yang cukup rendah di dalam penelitian ini tidak memiliki dampak terhadap keputusan para pemilih pemula dalam partisipasi politik.
3. Secara individual, *political efficacy* memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik para calon pemilih pemula. Namun, yang lebih signifikan adalah *internal political efficacy* ketimbang *external political efficacy.*
4. Penelitian ini menemukan fakta bahwa terdapat semacam hubungan khusus antara *external political efficacy* dengan *political trust.* Jika *political trust* rendah, maka sama pula halnya dengan *external political efficacy.*
5. *External political efficacy* dan *political trust* memiliki lokus yang sama sehingga para calon pemilih pemula menampilkan tanggapan yang paralel antara keduanya. Hal yang berbeda adalah *internal political efficacy* yang lebih bernuansa subyektif, yaitu identifikasi para calon pemilih pemula akan potensi di dalam diri mereka untuk terlibat di dalam kegiatan politik.
6. Kendati seluruh calon pemilih pemula yang menjadi responden sudah memiliki hak pilih, tetapi ternyata yang secara nyata memutuskan untuk ikut pemilu hanya sebesar 81,7% dan sisanya tampak kurang meyakini bahwa mereka akan ikut ambil bagian dalam kegiatan voting saat pemilu. Temuan ini mengindikasikan adanya semacam pengaruh ---yang memerlukan penelitian lebih lanjut----- dari *political trust* dan *external political efficacy.*

DAFTAR PUSTAKA

Axford, Barrie, et.al., ***Politics: An Introduction***, 2nd Edition (New York: Routledge, 2002)

Beck, Nathaniel and John Pierce, "*Political Involvement and Party Allegiancces in Canada and the United States*" dalam Robert Vance Presthus, ed., *Cross National Perspectives: United States and Canada*, (Leiden: E.J. Brill, 1977)

Best, Samuel J. and Benjamin Radcliff, *Polling America: An Encyclopedia of Public Opinion*, Volume II (P-Z) (Westport: Greenwood Press, 2005)

Birch, Anthony Harold, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, 3rd Edition (New York: Routledge, 2007

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia, 2008)

Cohen, Aaron and Eran Vigoda-Gadot, "*The Growth Value of Good Citizenship: An Examination of the Relationship Between Civic Behavior and Orientations and Work Outcomes*" dalam Eran Vigoda-Gadot and Aaron Cohen, *Citizenship and Management in Public Administration: Integrating Behavioral Theories and Managerial Thinking*, (Massachussets : Edward Elgar Publishing, Inc., 2004)

Dodd, Lawrence C., "*Congress, the President, and the Cycles of Power*" dalam Vincent Davis, ed., *The Post-Imperial Presidency*, (New Brunswick, New Jersey: Transaction, Inc., 1980)

Eksterowicz, Anthony J. and Robert North Roberts, *Public Journalism and Political*

Knowledge, (Oxford : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000)

Etzioni, Amitai, *Capital Corruption: The New Attack on American Democracy*, (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1995).

Fahmy, Eldin, *Young Citizens: Young People's Involvement in Politics and Decision Making*, (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006)

Garcia, John A. and Gabriel Sanchez, "*Electoral Politics*" dalam Sharon Ann Navarro and Armando Xavier Mejia, eds., *Latino American and Political Participation: A Reference Handbook*, (Santa Barbara, California: ABC-CLIO, Inc., 2004)

Gunther, Richard, Jose Ramon Montero, and Mariano Torcal, "*Democracy and Intermediation: Some Attitudinal and Behavioural Dimensions*" dalam Richard Gunther, et.al., eds., *Democracy, Intermediation, and Voting on Four Continet*s, (New York : Oxford University Press, 2007)

Hahn, Caroel, *Becoming Political: Comparative Perspectives on Citizenship Education*, (Albany: State University of New York Press, 1998)

Hart, Roderick P., "*Citizen Discourse and Participation: A Survey*" dalam W. Lance Bennett and Robert M. Entman, eds., *Mediated Politics: Communication and the Future of Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2001)

Heineman, Robert A., *Political Science: An Introduction* (The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996)

Holmberg, Sorel, "*Down and Down We Go: Political Trust in Sweden*" dalam Pippa Norris, *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government* (New York: Oxford University Press, 1999)

Hoover, Kenneth R. and Todd Donovan, *The Elements of Social Scientific Thinking*, 9th Edition (Boston : Thomson Higher Education, 2008)

Jary, David, "*Politics*" dalam Robert G. Burgess, *Key Variables in Social Investigation*, (Boston: Routledge & Kegan Paul, 1986)

Johnston, Larry, *Politics: An Introduction to the Modern Democratic State* (Toronto : University of Toronto Press, 2009)

LeRoy, Michael K., *Research Methods in Political Science: An Introduction Using Micro Case* (Boston : Thomson Higher Education, 2009)

Lipset, Seymour Martin and William Schneider, *The Decline of Confidence in American Institutions*, (Political Science Quarterly, Volume 98, Number 3, Fall 1983)

Listhaug, Ola and Kristen Ringdal, "*Trust in Political Institutions*" dalam Heikki Ervasti, et.al., eds., *Nordic Social Attitude in a European Perspective* (Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2008)

----------, "*Political Disaffection and Political Performance: Norway, 1957-2001*" dalam Mariano Torcal and Jose R. Montero, *Political Disaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions, and Politics* (New York : Routledge, 2006)

Mangaraj, Pranab, *Rural Development and Political Participation Among Tribals*, (New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 2003).

Pananithurai, Ganapathy and Swati Sucharita Nanda, *Voters Expectation and Reasoning of Participation in Electoral Process* (New Delhi: Asho Kumar Mittal, 2007)

Pateman, Carole, *Participation and Democratic Theory*, (New York : Cambridge University Press, 1999)

Pole, Antoinette, *Blogging the Political: Politics and Participation in a Networked Society*, (New York : Routledge, 2010)

Schubert, Gunther, "*Village Elections, Citizenship and Regime Legitimacy in Contemporary Rural China*" dalam Thomas Heberer and Gunter Schubert, eds., *Regime Legitimacy in Contemporary China: Institutional Change and Stability*, (New York: Routledge, 2009)

Schyns, Peggy and Margreet Nuus, "*Political Cynicism and Social Cohesion in Europe and the United States*", dalam Frane Adam, *Social Capital and Governance: Old and New Members of the EU in Comparison*, (Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers, 2007)

Torcal, Mariano and Ignacio Lago, "*Political Participation, Information, and Accountability: Some Consequences of Political Disaffection in New Democracies*" dalam Mariano Torcal and Jose R. Montero, eds., *Political Disaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions, and Politics* (Madison, New York : Routledge, 2006)

---------- and Jose Ramon Montero, "*Political Disaffection in Comparative Perspective*" dalam Mariano Torcal and Jose Ramon Montero, eds., *Political Disaffection in Contemporary Democracy: Social Capital, Institution*, Politics (New York: Routledge, 2006)

Verba, Sidney and Norman H. Nie, *Participation in America: Political Democracy and Social Equality* (Chicago: University of Chicago Press, 1987)

----------, et.al., *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison* (New York: Cambridge University Press, 1980)

Whiteley, Paul F. and Patrick Seyd, *High-Intensity Participation: The Dynamics of Party Activism in Britain*, (Michigan: Michigan University Press, 2002)

---

*Tentang Penulis:

Seta Basri adalah salah satu staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta